



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARMIN
2. Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)
3. NIK : 793398

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.320.000.000**

1. Tanah Seluas 105.44 m² di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA ,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m²/118 m² di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 109.96 m² di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA ,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 4280 m² di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 700.000.000
5. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 197.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS F700RG TX MT Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11D1D A/T / SOLO Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, - - Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOTOR, - - Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOTOR, - - Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. MOBIL, - - Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. MOTOR, PIAGGIO VESPA LX 150 IE A/T Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	870.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.387.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.387.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.